

# **SKRIPSI**

## **DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**DEWI SUKMA SALEH**

**A011191156**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**SKRIPSI**  
**DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN**  
**DI SULAWESI SELATAN**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**DEWI SUKMA SALEH**  
**A011191156**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2023**

**SKRIPSI**  
**DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI**  
**SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**DEWI SUKMA SALEH**

**AO11191156**

Telah dipertahankan dalam siding ujian skripsi

Makassar, 03 Januari 2023

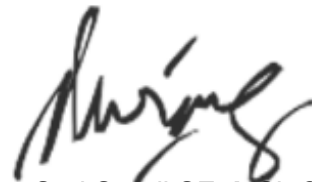
Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Retno Fitrianti, SE., MSi., CWM®.  
NIP. 19770913 200212 2 002

*acc  
ujian 14/12/2022*



Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., MSi., CWM®..  
NIP. 19770119 200801 2 008

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir SE., M.Si., CWM®.  
NIP 19740715 2002 12 1 003

# SKRIPSI

## DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

**DEWI SUKMA SALEH**

**A011191156**

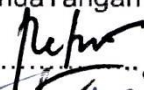
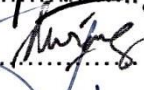


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

pada tanggal 03 Januari 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No Nama Penguji	Jabatan	TandaTangan
1. Dr. Retno Fitrianti,SE.,MSi.,CWM®.	Ketua	1. 
2. Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si.,CWM®	Sekretaris	2. 
3. Dr. Sultan Suhab, SE.,M.Si.	Anggota	3. 
4. Randi Kurniawan,S.E.,MSc	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir SE., M.Si., CWM®.  
NIP 19740715 2002 12 1 003

..

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Dewi Sukma Saleh**

Nomor Pokok : A011191156

Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UNHAS

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Determinan Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Selatan** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 03 Januari 2023

Yang menyatakan



(Dewi Sukma Saleh)

Nim: A011191156

## PERKATA

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridho-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **Determinan Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Selatan**.

Skripsi ini diajukan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan serta masukan dan saran dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Penulis sadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna dan tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Akan tetapi penulis memiliki harapan besar semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan menjadi pelajaran bagi penulis pribadi maupun yang membacanya.

Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah, H. Muh Saleh dan ibu Hj. Andi Farida yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga. Kepada kakak-kakak saya yang telah memberikan saya motivasi, dan semangat, Kepada seluruh keluarga besar yang tak sempat peneliti sebutkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan motivasi kepada peneliti.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga atas seluruh bantuannya, yakni kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya.
3. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Bapak Dr. Sabir SE., M.Si., CWM<sup>®</sup>. dan Sekretaris Dapartemen Ibu Dr. Fitriwati, SE.,M.Si. Terima Kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Ibu Dr. Retno Fitrianti,SE.,MSi.,CWM<sup>®</sup>. selaku penasehat akademik sekaligus pembimbing utama skripsi peneliti yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. dan terima kaish telah meluangkan waktunya untuk bimbingan dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesabaran dan nasehat yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi
5. Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi,SE.,MSi.,CWM<sup>®</sup>. selaku pembimbing II penulis. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bimbingan dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesabaran dan nasehat yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si. dan Bapak Randi Kurniawan ,S.E., M.Sc, selaku dosen penguji, terima kasih atas waktu dan motivasi yang telah diberikan serta kritik dan saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan dan nasihat kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.

7. Teman–Teman “GRIFFINS” Ilmu ekonomi 2019, terima kasih kebersamaannya insyaallah silaturahmi tetap jalan dan sukses terus kedepannya.
8. Keluarga besar HPPMI Maros Komisariat Unhas-PNUP yang telah memberikan kekeluargaan dengan semangat, Terkhusus pengurus HPPMI Maros Kom. Unhas PNUP Periode 2021/2022 terimakasih telah tetap menampung walaupun penulis sering menghilang.
9. dan yang terakhir terima kasih sahabat dan teman-teman baikku yang selalu *mensupport* peneliti dalam menyelesaikan skripsinya.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Makassar, 03 Januari 2023

Dewi Sukma Saleh



## **ABSTRAK**

Dewi Sukma Saleh

Retno Fitrianti

Nur Dwiana Sari Saudi

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Adapun data yang digunakan yaitu data time series Tahun 2006 – 2021 di Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak ada pengaruh dengan ketimpangan pendapatan, upah minimum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan IPM .

## **ABSTARCT**

Dewi Sukma Saleh

Retno fitrianti

Nur Dwiana Sari Saudi

This study aims to analyze the effect of economic growth, minimum wage and HDI on income inequality in South Sulawesi. This study uses secondary data processed from the Central Bureau of Statistics. The data used is time series data for 2006 – 2021 in South Sulawesi. The analytical method used is multiple linear regression method. The results of this study indicate that the variable economic growth has no effect on income inequality, the minimum wage has a significant effect on income inequality and HDI has a negative effect on inequality.

Keywords: Income Inequality, Economic Growth, Minimum Wage and HDI.

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTARCT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah .....	10
1.3 Tujuan penelitian .....	10
1.4 Manfaat penelitian.....	11
<b>BAB II.....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Ketimpangan Pendapatan.....	12
2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi .....	14
2.1.3 Upah Minimum .....	15
2.1.4 IPM ( Indeks Pembangunan Manusia) .....	17
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	19
2.2.1 Hubungan Pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan Pendapatan .....	19
2.2.2 Hubungan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	20
2.2.3 Hubungan IPM terhadap ketimpangan pendapatan .....	21
2.3 Tinjauan empiris.....	22
2.4 Kerangka Pikir Penelitian .....	25
2.5 Hipotesis penelitian .....	27
<b>BAB III.....</b>	<b>28</b>

3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	28
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.3 Metode Analisis Data.....	28
3.3.1 Uji Koefisien Determinasi.....	29
3.3.2. Uji Simultan.....	30
3.3.3 Uji Parsial.....	31
3.3.4 Uji Asumsi Klasik.....	31
3.4 Definisi Operasional.....	33
1. Ketimpangan Pendapatan.....	33
2. Pertumbuhan Ekonomi.....	33
3. Upah Minimum.....	33
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	34
<b>BAB IV .....</b>	<b>35</b>
4.1 Perkembangan Umum Variabel Penelitian.....	35
4.1.1 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan.....	35
4.1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi.....	37
4.1.3 Perkembangan Upah Minimum.....	39
4.1.4 Perkembangan IPM.....	40
4.2 Hasil Estimasi.....	42
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	47
4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	47
4.3.2 Pengaruh Upah Minimum terhadap ketimpangan pendapatan.....	49
4.3.3 Pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan.....	51
<b>BAB V .....</b>	<b>53</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Gini Ratio di Indonesia Tahun 2021-2017 .....	4
Tabel 4. 1 Gini Ratio Di Sulawesi Selatan Tahun 2006 - 2021 .....	35
Tabel 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2006 – 2021 .....	37
Tabel 4. 3 Upah Minimum Di Sulawesi Selatan Tahun 2006-2021.....	39
Tabel 4. 4 Indeks Pendidikan Dan Kesehatan di Sulawesi Selatan Tahun 2006- 2021 .....	41
Tabel 4. 5 Hasil Estimasi Regresi Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	42
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas .....	44
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	44
Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi .....	45
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Gini Ratio 11 Tahun Terakhir Di Pulau Sulawesi.....	5
Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian .....	26
Gambar 4. 1 Bagan Hasil Penelitian .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan, bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya (Aw, 2015). Semua negara harus mengidentifikasi potensi sumber daya ekonomi, merumuskan rencana pembangunan dan mengimplementasikannya melalui partisipasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup warga di semua tingkatan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang mencapai standar kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.

Masalah pembangunan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun berkembang, (Badriah, 2019). Masalah yang berkaitan dengan ketimpangan akan terus menjadi masalah di setiap negara yang sangat mendesak jika kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir khususnya di Indonesia dimana tren ketimpangan pendapatan belum menurun, pemerintah menghadapi penurunan ketimpangan pendapatan yang dikhawatirkan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Adapun pembangunan ekonomi di negara berkembang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pencapaian ini merupakan masalah utama yang dihadapi semua negara, terutama pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Investasi juga meningkatkan produksi dan dapat mempengaruhi pendapatan, yang dapat meningkatkan

pendapatan. Investasi mencerminkan faktor spesifik lokasi yang membentuk peluang dan insentif bagi bisnis untuk berinvestasi secara produktif, menciptakan lapangan kerja, dan berkembang.

Pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat, dan sangat penting bagi suatu negara, sehingga harus didistribusikan secara merata, ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah dan tingkat kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan, Ketimpangan pendapatan dapat terjadi antar individu, sektor dan daerah. Disparitas pendapatan antar daerah disebabkan oleh perbedaan demografi, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik daerah (Amrillah dan Yasa, 2013)

Ketimpangan yang besar juga dapat mengurangi pertumbuhan, karena rumah tangga berpenghasilan tinggi menolak kesempatan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk tetap sehat dan mengakumulasi modal fisik dan manusia. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya investasi dalam pendidikan. Anak-anak miskin bersekolah di sekolah yang berkualitas buruk dan mengalami kesulitan untuk lulus dari perguruan tinggi. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja mungkin lebih rendah daripada mereka yang berpenghasilan tinggi. Todaro dan Smith juga menjelaskan bahwa untuk keperluan analisis, ketimpangan dapat diukur dengan menggunakan rasio Gini. Angka ini berkisar antara 0 sampai 1 (A`laa dan Sutikno, 2019).

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi ketiga terluas di pulau Sulawesi, luasnya 46 717,48 kilometer persegi dan provinsi terpadat di pulau



tersebut dan provinsi ke 6 terpadat di Indonesia, terdiri dari 21 kabupaten, 3 kotamadya, 310 kecamatan, 792 kelurahan dan 2.255 desa. (Bps, 2019). Dilihat dari data PDRB mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, disebabkan karena lapangan usaha seperti sektor perdagangan, sektor pertanian, hotel dan restoran sebagai pendorong utama.

Indeks Gini digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan pendapatan antar daerah. Indeks Gini berkisar dari 0 hingga 1. Koefisien Gini 0 berarti pemerataan sempurna dan 1 berarti ketimpangan sempurna. Skor Indeks Gini kurang dari 0,3 termasuk dalam kategori ketimpangan "rendah". Skor antara 0,3 dan 0,5 termasuk dalam kategori ketimpangan "sedang". Pertidaksamaan dikatakan "tinggi" jika nilainya lebih besar dari 0,5 (A'laa dan Sutikno, 2019).

Tingkat Ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan berada di 10 besar tertinggi ketimpangan pendapatan. (Bps, 2021). Adapun Data Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia 5 Tahun Terakhir Dapat Dilihat Pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 1 Tabel Gini Ratio di Indonesia Tahun 2021-2017**

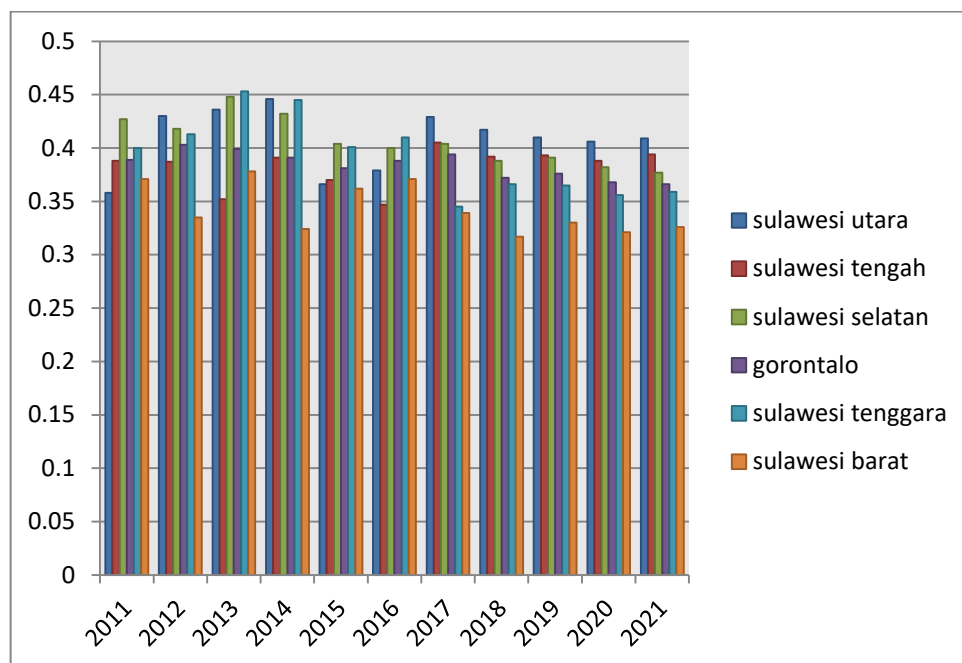
2017		2018		2019		2020		2021	
Provinsi	Gini Ration	Provinsi	Gini Ration	Provinsi	Gini Ration	Provinsi	Gini Ration	Provinsi	Gini Ration
Di Yogyakarta	0.44	Di Yogyakarta	0.422	Di Yogyakarta	0.428	Di Yogyakarta	0.437	Di Yogyakarta	0.436
Sulawesi Selatan	0.429	Gorontalo	0.417	Gorontalo	0.41	Gorontalo	0.406	Dki Jakarta	0.411
Jawa Timur	0.415	Jawa Barat	0.405	Jawa Barat	0.398	Dki Jakarta	0.4	Gorontalo	0.409
Dki Jakarta	0.409	Papua	0.398	Dki Jakarta	0.393	Jawa Barat	0.398	Jawa Barat	0.406
Gorontalo	0.405	Sulawesi Tenggara	0.392	Papua	0.391	Papua	0.395	Papua	0.396
Sulawesi Tenggara	0.404	Papua Barat	0.391	Sulawesi Tenggara	0.391	Sulawesi Tenggara	0.388	Sulawesi Tenggara	0.394
Papua	0.398	Nusa Tenggara Barat	0.391	Sulawesi Selatan	0.391	Nusa Tenggara Barat	0.386	Nusa Tenggara Barat	0.384
Sulawesi Utara	0.394	Dki Jakarta	0.39	Papua Barat	0.381	Sulawesi Selatan	0.382	Sulawesi Selatan	0.377
Jawa Barat	0.393	Sulawesi Selatan	0.388	Nusa Tenggara Barat	0.376	Papua Barat	0.376	Bali	0.375
Papua Barat	0.387	Sulawesi Utara	0.372	Nusa Tenggara Barat	0.376	Bali	0.369	Papua Barat	0.374

**Sumber(Bps, 2021)**

Melihat dari tabel di atas kita bisa lihat pada 2017 terdapat 4 provinsi yang ada di pulau Sulawesi dengan tingkat rasio gini tertinggi di Indonesia yaitu Sulawesi Selatan peringkat ke 2, Gorontalo peringkat ke 5, Sulawesi Tenggara peringkat ke 6, Sulawesi Utara peringkat ke 8. Selanjutnya, tahun 2018 terdapat 4 provinsi juga yang ada di pulau Sulawesi yaitu, Gorontalo peringkat 2, Sulawesi Tenggara peringkat 5, peringkat 9 & 10 Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Pada 2019 ada 3 provinsi pulau Sulawesi yaitu Gorontalo peringkat ke 2,

sulawesi tenggara peringkat 5, sulawesi selatan peringkat ke 6. Pada 2020 ada 4 provinsi pulau sulawesi yaitu gorontalo di peringkat 1, sulawesi tenggara ke 5, sulawesi selatan ke 7 dan sulawesi utara peringkat ke 10. Dan pada 2021 terdapat 3 provinsi pulau sulawesi yaitu gorontalo ke 3, sulawesi tenggara 6 dan sulawesi selatan peringkat ke 8. Adapun provinsi yang ada di pulau sulawesi yang terbilang ketimpangan pendapatannya kurang seperti sulawesi tengah dan dan sulawesi barat ada di urutan diluar dari 10 tertinggi. Adapun grafik gini ratio pulau sulawesi pada 11 tahun terakhir :

**Gambar 1. 1 Grafik Gini Ratio 11 Tahun Terakhir Di Pulau Sulawesi**



**Sumber : badan pusat statistik**

Melihat grafik diatas pada tahun 2011 ketimpangan tertinggi di sulawesi itu di sulawesi selatan dengan angka 0,427, di 2012 sulawesi utara menduduki tingkat tertinggi di sulawesi dengan angka 0,43, 2013 dan 14 sulawesi tenggara menduduki peringkat 1 ketimpangan tertinggi di sulawesi dengan angka 0,453 dan 0,445, di 2015 kembali lagi sulawesi selatan mengalami tingkat tertinggi

ketimpangan di Sulawesi dengan angka 0,404, di 2015 kembali lagi Sulawesi Tenggara dengan angka 0,41, di 2017 Sulawesi Selatan menduduki ketimpangan tertinggi dengan angka 0,429, dan pada tahun 2018--2021 yang paling tertinggi yaitu Sulawesi Tenggara. Dengan data di atas kita bisa melihat dari faktor - faktor yang berbeda di setiap provinsi.

Simon Kuznets mengatakan bahwa pola ketimpangan pendapatan seperti U terbalik, dimana pada tahap awal pertumbuhan perekonomian, distribusi pendapatan akan sejalan dengan peningkatan GNI (Gross National Income) per kapita, tetapi setelah melewati fase tersebut distribusi pendapatan akan membaik seiring dengan peningkatan GNP perkapita. Penjelasan mengapa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi menyebabkan ketimpangan pendapatan, karena sumber pertumbuhan ekonomi dipusatkan pada sektor industri modern yang kesempatan kerjanya terbatas tetapi tingkat upah dan produktivitasnya tinggi. Kemudian dari pertumbuhan sektor industri tersebut akan memberikan efek tumpahan (*trickle down effect*) dimana tidak hanya sektor industri saja yang bertumbuh, melainkan sektor lainnya yang juga ikut bertumbuh. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya pemerataan pendapatan (Todaro, 2013).

Dalam penelitian yang telah dilakukan Kuznets, menyimpulkan bahwa korelasi pertumbuhan dan ketimpangan sangat kuat, pada permulaannya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan ketimpangan yang disebabkan belum meratanya distribusi pendapatan, namun setelah tahapan yang lebih lanjut pemerataan akan semakin tercapai kemudian tingkat ketimpangan akan mengalami penurunan. Kuznets menggambarkan pola peningkatan dan penurunan tersebut dengan metode U terbalik yang ia ciptakan setelah meneliti kesenjangan di berbagai Negara.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat juga akan menyebabkan meningkatnya angka ketimpangan pendapatan, dimana pendapatan yang tercipta cenderung mengumpul pada wilayah yang mempunyai faktor-faktor produksi lebih banyak. Beberapa penyebab dari adanya ketimpangan suatu daerah adalah ketidakmerataan IPM, biaya infrastruktur dan investasi serta dapat juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah

Pertumbuhan ekonomi mengukur atau menerangkan prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti juga berarti perkembangan fiskal yang meningkatkan produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan jumlah barang produksi, pertumbuhan infrastruktur dan lain-lain. Oleh sebab itu, untuk memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara ukuran yang digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2016). Berdasarkan teori meningkatnya pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat sejalan dengan berkurangnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Namun kenyataannya meningkatnya pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan juga yaitu upah minimum, dimana Secara teori, teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum akan meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang menguranginya. Upah minimum menyebabkan, non-pasar, berperan menentukan batas minimum upah di pasar tenaga kerja, yang meningkatkan harga tenaga kerja. Dengan meningkatnya harga tenaga kerja, upah minimum

menghasilkan pengurangan permintaan tenaga kerja dan sebahagian pekerja akan menjadi pengangguran.

Dalam undang-undang upah minimum merupakan faktor penting dan relevan memberikan kontribusi untuk memperlambat ketimpangan upah antara bagian atas dan bawah dari distribusi upah dan pendapatan di Indonesia. Cun dan Khor (2010).

Dan tidak hanya pertumbuhan ekonomi dan upah minimum tetapi IPM ( indeks pembangunan manusia), bisa kita lihat bahwa IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah IPM pada tiap daerah itu berbeda, hal ini menjadikan IPM salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar daerah/wilayah.

Menurut Haris (2014) tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012, variabel yang digunakan Pertumbuhan

ekonomi, tingkat investasi dan IPM, dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Bahwa Variabel Pertumbuhan Ekonomi Dan Ipm Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah, Sedangkan Investasi Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah.

Sari Nurmalisa Sungkar, Nizamuddin, Muhammad Nasir. (2015) Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia, variabel yang digunakan ialah upah minimum dan kesenjangan pendapatan dan hasil penelitian hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel dalam penelitian ini secara signifikan memiliki hubungan yang positif, yang artinya peningkatan upah minimum akan menaikkan angka kesenjangan pendapatan atau memperbesar kesenjangan pendapatan.

Menurut Sri Danawati, dkk (2016) meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, variabel yang digunakan pengeluaran pemerintah, investasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan. Dan hasil dari penelitian tersebut yaitu pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun Kesempatan Kerja Berpengaruh Positif Tetapi Tidak Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Berpengaruh Positif Tetapi Tidak Signifikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, Pengeluaran Pemerintah, Kesempatan Kerja, Dan Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Pengeluaran

Pemerintah Dan Investasi Secara Tidak Langsung Berpengaruh Positif Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Kesempatan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian diatas, maka dianggap perlu untuk mengadakan penelitian mengenai “**DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN**”.

### **1.2 Rumusan masalah**

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan?
2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan?
3. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan?

### **1.3 Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan.



#### **1.4 Manfaat penelitian**

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan pada Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya yang bertemakan ketimpangan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Ketimpangan Pendapatan**

Todaro dan Smith menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menyebabkan beberapa hal, antara lain: 1. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan inefisiensi ekonomi 2. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas 3. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim umumnya dianggap tidak adil.( Haris (2014),

Ketimpangan pendapatan nyata terjadi di semua negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang, baik yang lebih merata maupun yang tingkat ketimpangannya lebih rendah. Todaro menjelaskan situasi ini antara lain dengan fakta bahwa negara-negara maju memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata daripada negara-negara dunia ketiga, yaitu negara-negara yang tergolong negara berkembang.(Todaro and smith, 2013).

Ketimpangan pendapatan sering menjadi masalah dengan percepatan pembangunan, membuat daerah dengan ekonomi dan sumber daya yang kuat lebih mudah untuk tumbuh dan daerah dengan sumber daya ekonomi yang lebih sedikit berjuang untuk bahkan mencatat pertumbuhan positif. (Arif and Wicaksana 2017). Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu dimana satu individu atau kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu atau kelompok lain. Ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan dalam besarnya pemerataan pendapatan suatu daerah sehingga banyak kendala yang dihadapi untuk mengatasi ketidakmerataan tersebut.

Distribusi pendapatan pada dasarnya adalah konsep distribusi pendapatan antar individu atau rumah tangga dalam masyarakat. Konsep pengukuran distribusi pendapatan dapat diwakili oleh dua konsep utama: konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Pertidaksamaan mutlak adalah konsep pengukuran pertidaksamaan menggunakan parameter yang memiliki nilai mutlak. Ketimpangan relatif adalah suatu konsep yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan tingkat pendapatan individu atau kelompok anggota masyarakat dengan total pendapatan masyarakat secara keseluruhan (Ahluwalia dalam Sukirno,2016). Distribusi proses produksi terjadi setelah memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha. Distribusi pendapatan mencerminkan pemerataan atau pemerataan hasil pembangunan daerah atau nasional. Ini baik per individu atau karena kepemilikan faktor-faktor produksi antara populasi.

Menurut Bank Dunia Ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung persentase pendapatan masyarakat pada kelompok berpenghasilan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk, yaitu: i) Ketimpangan dikatakan tinggi apabila 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima < 12% dari total pendapatan; ii) Ketimpangan dikatakan sedang apabila 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima 12%-17% dari total pendapatan; iii) Ketimpangan dikatakan rendah 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima > 17% dari total pendapatan (Nurlina, 2020).

Menjelaskan bahwa ketika pendapatan per kapita rata rata menurun pada tahap awal pembangunan, tingkat ketimpangan menurun. Jika pendapatan rata-rata tinggi, tingkat ketimpangan juga tinggi. Jika pendapatan rata-rata orang lebih tinggi dari sebelumnya, kesenjangan akan menyempit. Menafsirkan distribusi

pendapatan dalam transisi dari ekonomi pedesaan ke perkotaan atau dari ekonomi pertanian (tradisional) ke industri (modern). Kuznets (1995) Kesimpulan dari studi yang dilakukan oleh Kuznets: i) Studi terkait sebagian besar mendukung hipotesis Kuznets; ii) menunjukkan hubungan jangka panjang yang positif dengan distribusi pendapatan yang lebih adil di pendapatan yang lebih tinggi; iii) Ketimpangan distribusi pendapatan pada kurva Kuznets (kiri) rawan instabilitas.

Skor Gini Index memiliki skala antara 0 dan 1,0 dan menggambarkan pemerataan semua pendapatan yang diterima dari masyarakat (persamaan sempurna), dan adalah pemerataan semua pendapatan yang diterima dari masyarakat (ketidaksamaan), Ketimpangan yang rendah adalah nilai indeks Gini kurang dari 0,4. Koefisien Gini di atas 0,4 meningkatkan tingkat ketimpangan di Kurva Lorenz sebenarnya adalah hubungan antara persentase pendapatan yang diterima dengan total pendapatan yang diterima. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis ekivalen, semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan (Todaro dan Smith, 2013).

### **2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi**

Proses pertumbuhan bersifat menggumpal (kumulatif). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan menarik ke pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya jumlah penduduk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan keuntungan secara terus-menerus (semua ini terjadi dalam apa yang disebut Smith "Situasi Progresif" yang dalam kenyataannya merupakan keadaan yang menyenangkan bagi seluruh lapisan masyarakat). Dalam keadaan yang maju seperti ini, sementara masyarakat meraih hasil-hasil yang lebih baik,

keadaan buruh miskin menjadi kelompok yang paling bahagia dan nyaman. Tetapi proses ini ada akhirnya, kelangkaan sumber daya pada akhirnya memberhentikan pertumbuhan. Menurut Smith (Jhingan, 2014).

Apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus-menerus berlangsung secara kumulatif. Apabila pasar berkembang, pembagian kerja dan spesialisasi akan terjadi, dan yang belakangan ini akan menimbulkan kenaikan produktivitas dan pembangunan nasional. Kenaikan pendapatan nasional yang disebabkan oleh perkembangan penduduk yang terjadi secara bersama-sama akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang digunakan untuk kebutuhan investasi sementara spesialisasi dan pembagian kerja akan menciptakan inovasi penduduk dan inovasi proses. Proses yang berlangsung dari waktu tersebut menimbulkan perkembangan ekonomi dan meningkatkan pendapatan perkapita. (Sukirno, 2016).

### **2.1.3 Upah Minimum**

Upah ialah hasil kerja/usaha yang diberikan oleh perusahaan kepada seseorang dalam bentuk benda (uang). Besar kecilnya upah juga tergantung pada tingkat pekerjaan. Dalam pendekatan upah sering dikaitkan dengan sebuah sistem. Sistem yang dimaksud adalah sebuah peraturan yang tetap dan disahkan oleh suatu lembaga pusat yang guna menjaga kestabilan dan keadilan dalam memenuhi standar kebutuhan hidup. Upah adalah bentuk macam macam pembayaran berdasarkan timbul dari kontrak kerja, terlepas dari pekerjaan dan denominasinya. Upah dapat diartikan penghasilan yang diterima oleh pekerja berupa imbalan pekerjaan yang dilakukannya. Pemberian upah baik dalam bentuk uang tunai maupun uang digital. (Fachrurrozi, 2014).

Terdapat 3 macam upah menurut ( Sadono Sukirno, 2016). yang masing masing memiliki makna yang berbeda : 1. Upah nominal atau upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi, 2. Upah riil adalah upah yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja tersebut Kecenderungan yang selalu berlaku adalah keadaan dimana harga barang dan jasa maupun upah terus menerus mengalami kenaikan. Tetapi kenaikan tersebut tidaklah serentak dan juga tidak pada tingkat yang sama besarnya. Perubahan yang berbeda ini akan menimbulkan kesulitan untuk mengetahui sampai dimana kenaikan pendapatan merupakan suatu gambaran dari kenaikan kesejahteraan yang dinikmati oleh tenaga kerja. 3. Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektor regional maupun sektoral. Dalam hal ini upah minimum merupakan upah pokok terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali bekerja. Pada upah minimum terdapat unsur yang paling penting yakni, jumlah upah minimum harus mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan keperluan rumah tangga (Sonny Sumarsono dalam Normalitas , 2012).

Tujuan penetapan upah minimum menurut (Payaman J. Simanjuntak, 2001) adalah sebagai berikut: 1. Menghindari kemungkinan eksploitasi pekerja oleh pengusaha yang memanfaatkan kondisi pasar untuk akumulasi keuntungan 2. Untuk menghindari dan mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus sehingga mereka bersedia menerima upah dibawah tingkat kelayakan. 3. Sebagai jaring pengaman untuk

menjaga tingkat upah agar tidak menurun. 4. Mengurangi tingkat kemiskinan absolut pekerja, terutama bila upah minimum tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dasar pekerja serta keluarganya. 5. Mendorong peningkatan produktivitas melalui perbaikan gizi dan kesehatan pekerja maupun melalui upaya manajemen untuk memperoleh kompensasi atas peningkatan upah minimum. 6. Meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum. 7. Menciptakan hubungan industrial yang lebih aman dan harmon

#### **2.1.4 IPM ( Indeks Pembangunan Manusia)**

Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia itulah yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah, dengan mengklasifikasikan kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan dalam empat kategori status pembangunan manusia yang telah dikeluarkan oleh UNDP. Empat kategori tersebut yaitu Rendah bila angka IPM < 50, Menengah bawah bila angka  $50 < \text{IPM} < \text{IPM } 80$  (BPS,2019).

Pada aspek makro, Dumairy (1996), menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan, di antaranya (1) ketidaksetaraan anugerah awal (initial endowment) di antara pelaku-pelaku ekonomi termasuk perbedaan sumber daya seperti sumber daya alam, sarana dan prasarana ekonomi, kapital, keahlian/ keterampilan serta (2) bakat atau potensi antar daerah dan strategy pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian, untuk mengatasi adanya ketimpangan pendapatan, diperlukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia

seperti pendidikan (keterampilan) dan kesehatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan penduduk miskin. Penelitian ini fokus kepada aspek ketimpangan pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.

Indek Pembangunan Manusia (Todaro dan Smith, 2013) mencoba untuk memeringkat semua negara atau daerah dari skala 0 (IPM terendah) hingga 1 (IPM tertinggi) berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir IPM: 1. Masa hidup yang diukur dengan usia harapan hidup 2. Pengetahuan yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata sekolah (satu pertiga) 3. Standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil per kapita, disesuaikan dengan disparitas daya beli dari mata uang setiap 33 negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas yang semakin menurun dari pendapatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengindikasikan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Hidup sehat dan umur panjang, Pengetahuan, dan Standar hidup layak (Prasetya et al. 2022)



## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Hubungan Pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan**

#### **Pendapatan**

Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga Jurnal Pendidikan dan nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro,2003) dalam (Istiqomah,Syaparuddin,Rahmadi, 2018)

Permasalahan ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar kebutuhan hidupnya yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Jadi pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Menurut BPS pada periode 2012-2016 perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia berfluktuatif yaitu dengan rata rata sebesar - 1,515%. Hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan,(Arsyad, 1999) dalam (Hajiji, 2010).

Pertumbuhan ekonomi yang cepat juga akan menimbulkan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan, karena tidak melihat tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Lebih besar / kecil mana tingkat pertumbuhan penduduknya jika dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonominya. (Ermatry Hariani, 2019)

### **2.2.2 Hubungan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Upah minimum telah sangat kontroversial secara politik, dan telah menerima banyak dukungan dari ekonom kurang dari masyarakat umum. Banyak penentang bahwa upah minimum cukup tinggi untuk menjadi efektif, meningkatkan pengangguran, khususnya di antara pekerja dengan produktivitas yang sangat rendah karena kurangnya pengalaman sehingga merugikan pekerja kurang terampil dan mungkin tidak termasuk beberapa kelompok dari pasar tenaga kerja, selain itu kurang efektif dan lebih merusak bisnis daripada metode lain untuk mengurangi kemiskinan. Dampak upah minimum terhadap distribusi pendapatan keluarga mungkin negatif kecuali pekerjaan lebih sedikit tetapi lebih baik dialokasikan untuk anggota keluarga yang membutuhkan daripada, misalnya, remaja dari keluarga tidak miskin (Mankiw, 2011).

Peningkatan upah minimum provinsi (UMP), akan mengurangi ketimpangan pendapatan dikarenakan. Diduga bahwa peningkatan dari Upah Minimum Provinsi akan mengurangi arus migrasi khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Berkurangnya arus migrasi didorong oleh teori bahwasanya migrasi terjadi dikarenakan faktor ekonomi, dalam artian peningkatan penghasilan, dimana salah satunya diukur dari upah. Jika upah meningkat maka sebagian tenaga kerja yang berpenghasilan rendah dan

menengah diduga akan mengurangi tingkat migrasi dikarenakan daya beli mereka telah bertambah.(nangarumba, 2015)

### **2.2.3 Hubungan IPM terhadap ketimpangan pendapatan**

Becker menyatakan bahwa IPM berpengaruh terhadap ketimpangan. Becker mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dan menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa, semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan penduduk dapat ditunjang dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Hidayat dan Nugroho, 2014).

kenaikan pendapatan yang besar dapat berperan relatif lebih kecil dalam pembangunan manusia. Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri. Tidak meratanya Indeks Pembangunan Manusia di berbagai daerah menyebabkan terdapat daerah yang lebih maju karena kualitas manusianya lebih baik dan ada daerah yang tidak maju karena kualitas manusianya rendah. (Todaro dan Smith, 2006)

Dalam kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tercermin di dalam Indeks Pembangunan Manusia meningkat, maka kesehatan dan pendidikan juga meningkat yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya produktivitas manusia yang diakibatkan oleh tingginya kualitas sumber daya manusia (SDM) tersebut. Pernyataan tersebut dapat mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik sehingga pada akhirnya masyarakat layak mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi dengan upah yang tinggi. Ketika tingginya rata-rata pendapatan yang diterima, maka tingkat ketimpangan pendapatan juga menurun (Prasetya, dkk, 2022)

### **2.3 Tinjauan empiris**

Haris (2014), Hasil Regresi Menunjukkan Bahwa Variabel Pertumbuhan Ekonomi Dan Ipm Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah, Sedangkan Investasi Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah. Dengan Nilai R Square Sebesar 0,9920 Berarti Variasi Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Ipm Mampu Menerangkan 99,20 Persen Variasi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Dan 0,80 Persen Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Dijelaskan Oleh Variasi Yang Tidak Dimasukan Dalam Penelitian Ini. Dan variabel yang digunakan penelitian tersebut adalah Pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi dan IPM.

Sri Dianawati, dkk (2016), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Kesempatan Kerja Berpengaruh Positif Tetapi

Tidak Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Berpengaruh Positif Tetapi Tidak Signifikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, Pengeluaran Pemerintah, Kesempatan Kerja, Dan 1 Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Secara Tidak Langsung Berpengaruh Positif Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Kesempatan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Penelitian ini menggunakan variabel pengeluaran pemerintah, investasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan.

Istiqomah (2018) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia) hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi secara signifikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan maupun mengurangi jumlah penduduk miskin. Penelitian ini menggunakan variabel Pertumbuhan ekonomi.

Sari Nurmalisa Sungkar dkk (2015) Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel dalam penelitian ini secara signifikan memiliki hubungan yang positif, yang artinya peningkatan upah minimum akan menaikkan angka kesenjangan pendapatan atau memperbesar kesenjangan pendapatan. Penelitian ini menggunakan variabel upah minimum dan kesenjangan pendapatan.

Maria Agape Widya Prasetya, dkk (2022) Hasil analisis penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pinjaman yang disalurkan oleh LKM secara signifikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sedangkan variabel IPM dan jumlah LKM terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Ketimpangan Pendapatan; Lembaga Keuangan Mikro; Indeks Pembangunan Manusia.

Samuel asmanandu sarkodie & Samuel adams ( 2020 ) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif terhadap akses listrik sedangkan pendapatan tingkat dan pembangunan manusia memiliki dampak positif pada akses ke listrik. Meningkatkan politik lingkungan sistem di Afrika Sub-Sahara sangat penting untuk memastikan akses ke listrik yang bersih dan modern. Pengaruh negatif sistem politik terhadap ketimpangan pendapatan berarti lingkungan pemerintahan yang baik mengurangi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan ditemukan untuk mengurangi pembangunan manusia, seperti, sosial kebijakan perlindungan yang mengurangi kemiskinan sangat penting untuk meminimalkan kerentanan terhadap kemiskinan. Itu studi menyoroti bahwa promosi pasar tenaga kerja yang efektif dan peningkatan sosial-ekonomi kapasitas untuk mengelola pengangguran, kelemahan, dan kecacatan akan mengurangi ketimpangan pendapatan, oleh karena itu, mempromosikan pembangunan manusia.

Niklas Engbom & Christian Moser (2021) hasil penelitiannya Hasil kami menyatakan bahwa upah minimum memiliki efek limpahan yang luas pada upah yang lebih tinggi dalam distribusi, terhitung sepertiga dari penurunan 25,9 log point dalam varians pendapatan log di Brasil sejak 1994. Pada saat yang sama, upah minimum efek upah pada pekerjaan dan output diredam oleh realokasi pekerja ke perusahaan yang lebih produktif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Upah minimum.

## 2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menganalisis pengaruh PDRB, Upah Minimum, dan Ipm terhadap ketimpangan ekonomi di Sulawesi Selatan, ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia di antara sekian banyak masalah di Indonesia, adapun faktor yang mempengaruhi tersebut diantaranya: (1) Pertumbuhan ekonomi, (2) Upah minimum, (3) IPM. Variabel-variabel tersebut dimaksudkan akan lebih mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh tingkat ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan, berawal dari tingginya tingkat ketimpangan pendapatan menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun.

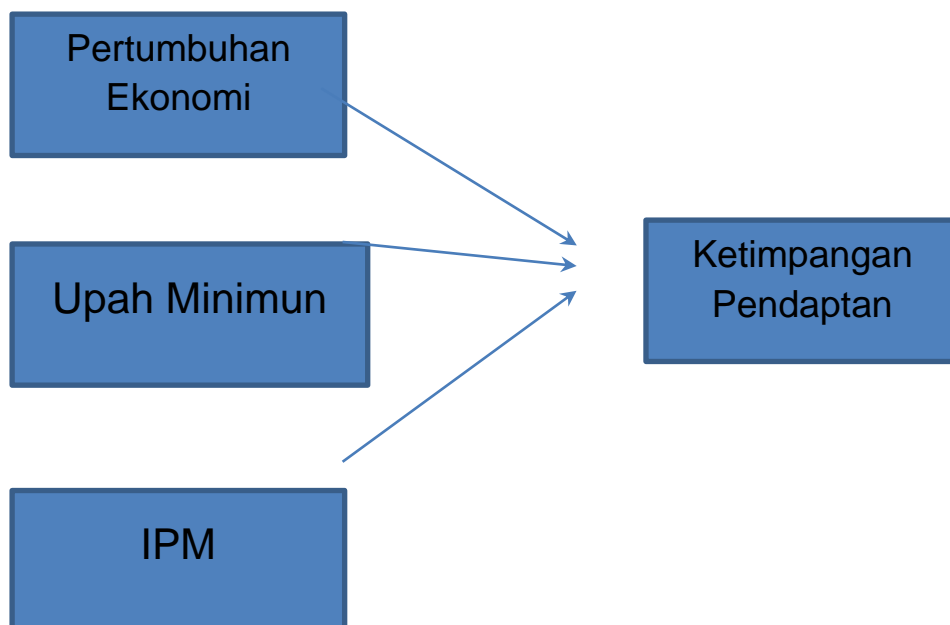
Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan adalah pembangunan suatu wilayah, salah satu variabel yang mempengaruhi tingkat ketimpangan adalah PDRB yang merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Bisa kita lihat bahwa yang dijadikan dasar mengukur keberhasilan ekonomi suatu negara atau wilayah, namun menyisakan persoalan yang terkadang disepelekan. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi mestinya tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat, namun kenyataannya masih banyak masyarakat miskin, kesenjangan makin melebar, distribusi pendapatan tidak merata dan masih terjadi defisit anggaran.

Selanjutnya faktor upah minimum, dimana Secara teori, teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum akan meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang mengurangnya. Upah minimum menyebabkan non-

pasar, berperan menentukan batas minimum upah di pasar tenaga kerja, yang meningkatkan harga tenaga kerja. Dengan meningkatnya harga tenaga kerja, upah minimum menghasilkan pengurangan permintaan tenaga kerja dan sebahagian pekerja akan menjadi pengangguran.

Dan salah satu faktor tingginya ketimpangan pendapatan ialah Indeks pembangunan manusia (IPM) yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi

Maka adapun kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian**



## **2.5 Hipotesis penelitian**

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Selatan.
2. Diduga upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Selatan.
3. Diduga IPM berpengaruh terhadap ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Selatan.